

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti memaparkan penjelasan dari variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1. Tenaga Kerja

2.1.1.1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang memasuki usia kerja yaitu 15-64 tahun yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur.

Golongan yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar tenaga kerja sehingga kelompok ini dapat disebut juga sebagai angkatan kerja potensial. Simanjuntak (2001) dalam (Ramdani dkk., 2021) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batasan umur. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

2.1.1.2. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha. Tenaga kerja merupakan mereka yang telah bekerja dan terserap dalam sektor perekonomian dimana hal tersebut akan berdampak dalam menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar. Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara bersamaan sehingga dapat menentukan upah keseimbangan dan suatu keseimbangan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja yang terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan adanya permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. (Kuncoro, 2002).

2.1.1.3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Hubungan tenaga kerja dan permintaannya merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang diinginkan oleh perusahaan untuk dipekerjakan. Permintaan akan tenaga kerja pada perusahaan merupakan turunan dari permintaan akan barang atau jasa. Hal tersebut dikarenakan permintaan akan barang atau jasa menjadi salah satu faktor penentu akan permintaan tenaga kerja

selain faktor produktivitas, harga input-input lain dan jumlah pengusaha (Tarmizi, 2012). Sehingga peningkatan permintaan barang dan jasa yang kemudian menyebabkan peningkatan jumlah produksi akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dapat bergeser menjadi lebih sedikit atau lebih banyak diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut Tarmizi (2012), faktor-faktor yang memengaruhi permintaan tenaga kerja yaitu jumlah permintaan produk, produktivitas, jumlah pengusaha dan harga input lain. Di luar itu, faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja seperti pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh individu pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu (Sholeh, 2007). Dalam teori klasik, pekerja merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak, serta bebas menentukan jumlah jam kerja yang mereka inginkan. Ini didasarkan atas teori konsumen yang di mana tiap individu akan memaksimalkan kepuasan dengan segala hambatan yang dihadapinya. Kepuasan individu dapat diperoleh dengan konsumsi atau menikmati waktu luang, sedangkan hambatan yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Oleh karena itu, tiap individu mempunyai pilihan untuk bekerja atau menikmati waktu luang (*leisure*) akibat adanya waktu yang dikorbankan. Terdapat faktor penting dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu upah. Individu yang memutuskan untuk bekerja akan mendapat insentif berupa upah. Namun jika individu lebih memilih untuk bersenang-senang, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh upah. Untuk menganalisa kondisi tersebut, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yakni efek substitusi

(*substitution effect*) yang merupakan keadaan ketika kenaikan tingkat upah memutuskan individu untuk menambah waktu kerjanya sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dan efek pendapatan (*income effect*) yang terjadi saat kenaikan tingkat upah membuat individu cenderung untuk meningkatkan waktu senggangnya dan mengurangi waktu kerjanya. Dalam penawaran tenaga kerja juga terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Nicholson (2002), faktor-faktor yang menggeser penawaran input tenaga kerja terjadi akibat berkurangnya/meningkatnya preferensi untuk bersantai dan meningkatnya/menurunnya minat kerja. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi penawaran kerja, yakni di antaranya jumlah penduduk, struktur umur, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, bukan angkatan kerja, keadaan perekonomian, dan tingkat pendidikan. Permintaan dan penawaran harga input tenaga kerja ini pada suatu titik akan membentuk keseimbangan akibat pertemuan keduanya di pasar tenaga kerja.

2.1.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

2.1.2.1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam

negeri. Persentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal 95%. Sedangkan pihak penanam modal dalam negeri, minimal modalnya sebesar 5%.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa modal asing merupakan modal yang dimiliki pihak asing baik berbentuk badan usaha berbadan hukum asing maupun berbadan hukum Indonesia dengan sebagian atau seluruh modalnya milik asing. Modal asing juga dapat dikategorikan untuk para pemilik modal asing perseorangan.

2.1.2.2. Faktor Yang Memengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) sangat bergantung pada elemen-elemen pendukung yang terdapat dalam suatu negara sebagai tolak ukur keberlangsungan dan berjalannya iklim investasi yang kondusif sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Berikut ini teori para ahli yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA).

a. Teori Alan M. Rugman

Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu; Ekonomi, non Ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi merupakan elemen paling penting yang menjadi perhatian bagi para penanam modal. Sedangkan

variabel non ekonomi mencakup kondisi sosial, budaya dan masyarakat dalam suatu negara. Sementara pemerintah akan selalu diperhatikan oleh investor karena kondisi politis suatu negara akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Sementara variabel lainnya adalah internalisasi yakni keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

b. Teori Jhon Dunning

Teori ini merumuskan persyaratan yang terdiri dari tiga hal bila sebuah perusahaan ingin berkecimpung dalam penanaman modal asing. Pertama, keunggulan perusahaan yang terdiri dari; teknologi pemilikan, penelitian, pengembangan, keterampilan manajerial, pemasaran, organisasi perusahaan, diferensiasi produk, merek dagang, nama, ukuran besar yang memerlukan skala ekonomi dan keperluan modal. Kedua, keunggulan internalisasi dengan asumsi kondisi paragraf diatas terpenuhi. Kondisi yang mendukung internalisasi meliputi; biayanya tinggi dalam membuat kontrak, ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual, keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga. Ketiga, keunggulan spesifik negara meliputi; sumber daya alami, kekuatan tenaga kerja biaya rendah dan efisien serta rintangan perdagangan membatasi impor.

c. Teori David K. Eiteman

Teori ini menjelaskan bahwa penanaman Modal Asing didasari atas tiga motif, yaitu; motif strategi, motif perilaku dan motif ekonomi. Motif perilaku merupakan motif yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal

perusahaan dan organisasi sementara motif ekonomi merupakan motif mencari keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal I tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang (Arfida, 2003). Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pendidikan adalah proses atau usaha bagi individu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Gregory (2006) dalam (Ganie, 2017) pendidikan merupakan modal utama manusia untuk menggapai kesuksesan ekonomi dalam jangka panjang suatu negara. Pendidikan juga diartikan sebagai bentuk usaha terencana yang dilakukan untuk pembentukan manusia yang berkualitas, aktif mengembangkan potensi diri, dan agar dapat bersaing dalam era persaingan global. Jika dikaitkan dengan masalah persiapan tenaga kerja, pengertian pendidikan menurut Tirtarahardja dan Sulo (1994) dalam (Ganie, 2017) adalah sebagai kegiatan membentuk peserta didik agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pendidikan mencerminkan kualitas atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk di suatu

negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula produktivitas seseorang dalam bekerja atau kemampuan kerjanya. Pendidikan formal merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perolehan kesempatan kerja.

Indikator pendidikan yang digunakan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, yaitu angka partisipasi sekolah (APS) dan angka putus sekolah (*Drop Out*).

2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau provinsi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah , dalam kurun waktu tertentu biasanya tiap tahun (Soebagiyo, 2007).

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan seluruh jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa untuk unit ekonomi di suatu wilayah.

Hukum Okun (*Okun's Law*) menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja, bahwa jika terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja disuatu daerah tersebut juga akan meningkat. Hukum

Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2%. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di wilayah tersebut. Selain itu kondisi perekonomian secara menyeluruh di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah yang bersangkutan. Dalam menghitung PDRB dapat dilakukan dengan empat pendekatan yaitu :

a. Metode Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Unit – unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha.

b. Metode Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang telah diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan: semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

c. Metode Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swata nirlaba, pengeluaran

konsumsipemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang dihasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor – faktor produksi, PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya dalam perkembangannya terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi. Macam-macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

- 1) Produk Domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan (PDRB riil) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu.

Adapun Metode perhitungan Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Adapun berbagai macam cara yang digunakan untuk menghitung PDRB dengan cara tersebut antara lain:

- a) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar berlaku dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung digunakan ada tiga macam pendekatan perhitungan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Sedangkan metode tidak

langsung digunakan apabila data yang diperlukan untuk menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

b) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil bukan karena adanya pengaruh harga. Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan yaitu: Revaluasi, Ekstrapolasi, Deflasi, Deflasi berganda (Paramitha G.W.N, 2009).

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.2 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui antar variabel X dan Y yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Zidayaturrofiqoh, Zulfanetti, dan Muhammad Safri (2018) dengan judul “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi”.	Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB	Upah Minimum dan Pengeluaran Pemerintah	PDRB, UMP, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan.	e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 7. No.1, Januari – April 2018
2.	Eva Agustin (2020) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Mojokerto 2014 – 2018”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan	Upah Minimum	Pengaruh tingkat pendidikan dan UMK di Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar 97,87% (Tinggi) melalui hubungan linear.	Vol.1 No.7 Desember 2020 Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), UIN Sunan Ampel Surabaya
3.	Ririn Rusniati, Sudarti, Atut Frida Agustin (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang”.	Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh signifikan secara simultan.	FALAH Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 3, No.2, Agustus 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Sapriansah Ali Nur Ikhsan, Zainal Arifin, M. Sri Wahyudi Suliswanto (2020) dengan judul "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia".	Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum	Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama- sama (simultan) mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.	pp. 42-55 Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Muhamma diah Malang
5.	Esthi Bhakti Warapsari, Wahyu Hidayat, Arfida Boedirochminarni (2020) dengan judul "Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur".	Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Inflasi dan Upah Minimum	PDRB, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi secara simultan berpengaruh signifikan.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No. 2, May 2020, pp. 194- 208
6.	Leo Budiriansyah (2017) dengan judul "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan".	Penyerapan Tenaga Kerja dan Investasi	Upah Minimum	Pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan positif, sedangkan upah minimum provinsi memiliki pengaruh signifikan negatif.	Jurnal EKOBIS Vol 1 No. 11 Desember 2017

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Eka Putri, Eni Setyowati, Imron Rosyadi (2022) dengan judul “Pengaruh PDRB, UMK, dan IPM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum	UMK berpengaruh signifikan positif dalam penyerapan tenaga kerja. Sedangkan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan untuk penyerapan tenaga kerja. Variabel IPM tidak berpengaruh secara signifikan untuk penyerapan tenaga kerja.	Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 651-655
8.	Nurliana Mufida, Muchtolifah, Sishadiyati (2020) dengan judul “Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan	Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi	Upah tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sementara pertumbuhan ekonomi dan pendidikan memiliki dampak penting dan besar pada penyerapan tenaga kerja.	Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 7 Juli 2021 p-ISSN : 2722-7782 e-ISSN : 2722-5356
9.	Harun Al Rasyid, Agus Tri Indah K (2022) dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bogor”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum	Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten secara bersama-sama mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja.	Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 e-ISSN: 2548-9224

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Mursidah, Eny Fahraty (2019) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan”.	Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum	Secara simultan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh positif.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 2 No. 4, 2019, hal 863-871
11.	Alamsyah Muhammad Effendi (2020) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan	Upah Minimum	Tingkat pendidikan dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3 No. 2, 2020, hal 500-515
12.	Yulia Pangastuti (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum, Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan negatif, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif.	Economics Development Analysis Journal 4 (2) (2015) Universitas Negeri Semarang ISSN 2252-6765

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Emil Abdhal Hafiz, Ria Haryatiningsih (2021) dengan judul “Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, UMK berpengaruh positif, IPM berpengaruh positif.	Journal Riset Ilmu Ekonomi Volume 1, No. 1, Tahun 2021, Hal: 55-65 ISSN: 2798-639X
14.	I Gusti Agung Indradewa, Ketut Suardhika Natha (2015) dengan judul “Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”.	Penyerapan Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Inflasi dan Upah Minimum	PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan.	E-Jurnal EP Unud, 4 [8]: 923-950 ISSN: 2303-0178
15.	Latri Wihastuti, Henny Rahmatullah (2018) dengan judul “Upah Minimum Provinsi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa”.	Penyerapan Tenaga Kerja	Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi	UMP berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan.	Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 96 - 102

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2014:93) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat dan penanaman modal asing, tingkat pendidikan, produk domestik regional bruto sebagai variabel bebasnya.

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti :

2.3.1. Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Investasi ini menentukan skala usaha dari suatu industri dan akan mempengaruhi kemampuan dari usaha tersebut dalam menggunakan faktor produksi. Dalam hal ini berhubungan dengan sejumlah investasi perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoretis, semakin besar nilai investasi maka kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi (Sukirno, 2000). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiriansyah (2017), yang menyatakan bahwa investasi baik investasi asing maupun dalam negeri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang artinya jika investasi naik maka penyerapan tenaga kerja pun seharusnya meningkat.

2.3.2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan hasil produksi suatu perusahaan yang nantinya dapat mendorong perusahaan untuk menambah jumlah tenaga kerjanya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing, (2017) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat

meningkatkan terserapnya tenaga kerja dan apabila tingkat pendidikan seseorang rendah, mengakibatkan sulitnya diterima dalam dunia kerja.

2.3.3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Mankiw (2000), produk domestik regional bruto (PDRB) dapat dilihat sebagai perekonomian total. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan kerja baru dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja guna untuk meningkatkan faktor produksi perusahaan tersebut. Dengan demikian akan dapat mengurangi jumlah angka pengangguran jika terjadi peningkatan tenaga kerja. Hal itu didukung oleh Lincoln (1997), ketika produk domestik regional bruto meningkat maka permintaan jumlah tenaga kerja juga akan meningkat, dimana peningkatan produk domestik regional bruto berbanding dengan naiknya pertumbuhan ekonomi sehingga kemakmuran masyarakat juga bertambah. Ketika kemakmuran masyarakat bertambah akan menyebabkan banyaknya atau tersedianya lowongan pekerjaan yang berdampak akan mengurangi angka pengangguran.

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofandillah Arumsyah Putridan Aris Soelistyo (2018) menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Gerbangkertasusila tahun 2013-2016. Selain itu sejalan dengan penelitian dari Kairupan (2013) bahwa PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara.

2.3.4. Hubungan Covid-19 dengan Penyerapan Tenaga Kerja

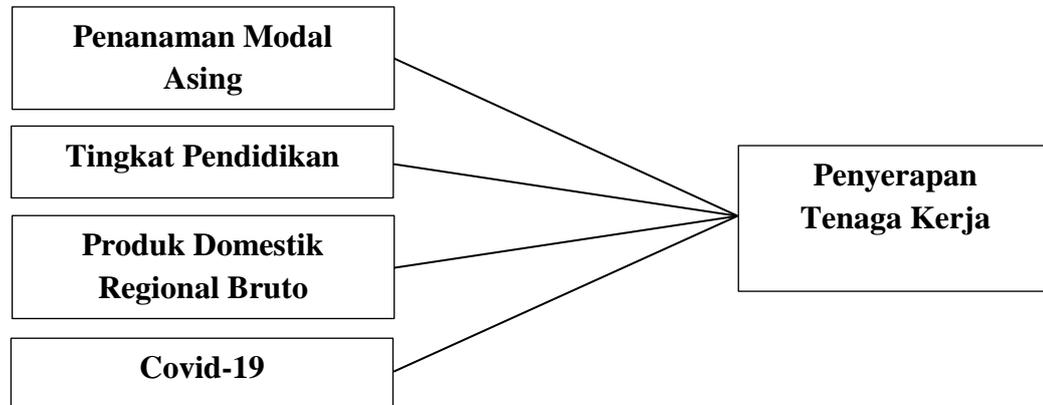
Pada awal tahun 2020 pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia, hampir semua sektor terdampak oleh Covid-19 tak terkecuali pada sektor ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan menjadi salah satu bagian yang terdampak di bidang ekonomi. Menurut badan pusat statistik (BPS) Jawa Barat, pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Penurunan ini disebabkan oleh perusahaan yang kesulitan memberikan upah atau gaji kepada para pekerja karena lumpuhnya kegiatan ekonomi, daya beli masyarakat yang turun secara drastis yang disebabkan kenaikan harga karena terganggunya sisi penawaran.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrial (2020) yang menyatakan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang sama dilakukan oleh Eman Sulaeman (2022) yang menyatakan bahwa Covid-19 memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul kerangka pemikiran yang dianggap perlu dilakukan pengujian berkaitan dengan pengaruh penanaman modal asing, tingkat pendidikan, produk domestik regional bruto, dan Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berikut merupakan kerangka pemikiran sebagaimana dalam Gambar 2.1 :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah dijelaskan, maka hipotesis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga penanaman modal asing, tingkat pendidikan, dan produk domestik regional bruto secara parsial berpengaruh positif, sedangkan Covid-19 berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.
2. Diduga penanaman modal asing, tingkat pendidikan, produk domestik regional bruto, dan Covid-19 secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2021.